

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN MARITIM TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. Asropi, M.Si

Dosen STIA LAN Jakarta

Eko Deni Hartono, S.H.

Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIA LAN Jakarta

Yudi Handoko, S.T.

Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIA LAN Jakarta

Abstract

Maritime is a world civilization because the interests of countries in the world will be determined by how the management and utilization of the sea for the prosperity and sustainability of the nations of the world. Likewise, Indonesia, which 70% of its territory is sea and ocean, needs to put its development direction as an Maritime State. The ancestors of the Indonesian people had reached the golden age as a maritime nation at the time of the Mataram and Sriwijaya Kingdoms and other kingdoms in the archipelago who "controlled the sea" from various parts of the earth so as to gain prosperity for their people from the sea through economic activities and global trade by utilizing the sea. The era of maritime glory faded during colonial times and has an impact on development orientation that has not integrated land and sea development as a development force for the welfare of the Indonesian people.

Keywords: *Management and utilization of the sea, land and sea development*

Abstrak

Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula Indonesia yang 70 % wilayahnya berupa laut dan lautan perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang "menguasai laut" dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejayaan maritim tersebut pudar pada masa penjajahan dan berimbas sampai sekarang orientasi pembangunan kurang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

Kata kunci: Pengelolaan dan pemanfaatan laut, pembangunan darat dan laut

PENDAHULUAN

Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula Indonesia yang 70 % wilayahnya berupa laut dan lautan perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang "menguasai laut" dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejayaan maritim

tersebut pudar pada masa penjajahan dan berimbas sampai sekarang orientasi pembangunan kurang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

Secara geo-politik dan geo-strategis, Indonesia terletak diantara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudera, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Posisi strategis tersebut menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam menjaga wilayah kedaulatan dan kepentingan sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mampu menyelesaikan batas wilayahnya dengan 10 negara tetangga (Tabel 1) , yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), terdapat empat batas maritim yang harus diperjanjikan, yaitu:

Pertama, laut teritorial (*teritorial sea*), adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, yang lebar lautnya tidak boleh melebihi 12 mil laut.

Kedua, zona ekonomi eksklusif (*economic exclusive zone*), adalah wilayah berdaulat yang tidak boleh melebihi 200 mil laut, diukur dari garis pangkal yang sama yang dipakai untuk mengukur lebar laut teritorial. Pada wilayah ini, suatu negara mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus untuk memandatkan kekayaan alam yang berada pada jalur tersebut, termasuk pada dasar laut dan tanah dibawahnya.

Ketiga, landas kontinen (*continental shelf*). Menurut Summer, teori dari landas kontinen didasarkan kepada suatu fakta sosiologis bahwa disepanjang sebagian besar pantai, tanahnya menurun ke dalam laut, sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut. Hal ini sesuai Pasal 76 UNCLOS 1982, landas kontinen suatu negara pantai adalah dasar laut dan tanah dibawahnya yang merupakan kelanjutan daratan wilayahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar dan dalam hal tertentu dapat sampai 350 mil laut, tergantung jarak tepian kontinennya.

Keempat, zona tambahan (*contiguous zone*), adalah zona maritim yang berdampingan dengan laut teritorial dan merupakan area tambahan (Pasal 33 UNCLOS 1982). Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal yang sama untuk lebar laut teritorial. Pada zona tambahan memiliki kekuasaan terbatas untuk penegakkan hukum bea cukai, keimigrasian, fiskal, dan saniter.

Selain penyelesaian batas maritim, ke depan, Indonesia harus mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam laut di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, seperti klaim terhadap landas kontinen sejauh 350 mil di wilayah Samudera Hindia dan kawasan dasar samudera. Dalam konteks ekonomi yang lain, Indonesia harus mampu memanfaatkan selat strategis seperti Selat Malaka dan 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai sumber pendapatan negara dan rakyat, melalui pengembangan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam pengembangan negara maritim, Indonesia harus memiliki visi "outward looking" didasarkan pada peraturan internasional yang dimungkinkan untuk mendapatkan sumberdaya alam laut secara global maupun mengembangkan kekuatan armada laut nasional untuk dapat menguasai

pelayaran internasional dengan menciptakan daya saing sehingga kapal-kapal berbendera Indonesia menguasai pelayaran internasional dan memiliki kekuatan laut (*sea power*) yang unggul.

Pengembangan pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang kompetitif, efisien dan maju disegenap wilayah Indonesia yang mampu mendorong terbangunnya aktivitas ekonomi di seluruh kepulauan maupun jalur ALKI sehingga manfaat peningkatan perdagangan dunia dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan kemakmuran disegenap penjuru nusantara. Berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya kelautan dan fungsi laut harus dilakukan secara terpadu dalam matra darat, laut dan udara.

KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses playanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan,. Anderson (1975) menyebutkan 4 (empat) aspek penting dalam implementasi, hakekat proses administrasi, kepatuan atas suatu efek atau dampak implement. Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merahi dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisilain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*out put*) maupun sebagai hasil. Sementara itu menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Winarno (2005), proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forthe in prior decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu, pejabat-pejabat, kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan –tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan), *grindle* dalam Abdul Wahab (2005), implementasi kebijakan (merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jau lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (1997) adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuantujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome (hasil). Sayangnya, dalam khasanah pengetahuan yang kini dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, harus diakui bahwa hanya baru pada dasar terakhir ini saja para ilmuwan sosial, khususnya pada para ahli ilmu politik menaruh perhatian yang besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses perumusan kebijakan. Proses untuk melakukan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Karna itu, keliru apabila menganggap bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung

secara mulus tanpa hambatan. Harus di pahami bahwa proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek *to implement* (untuk pelaksanaan) berarti *to provide the means fof carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), berarti *to give practical effect to* (menimbulkan dampak pada sesuatu). Kalau pandangan ini diikuti, maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan-badan atministratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politi, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharap (*intended*) maupun yangtidak diharapkan. Untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan adanya sifat implementasi kebijakan menurut Islami (1997-102-106). Sifat kebijakan di bedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: 1) Bersifat *Self Executing* yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. 2) Bersifat *Non Self Executing* bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

PEMBANGUNAN

Menurut Rostow pembangunan ekonomi atau proses tranformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti hanya perubahan struktur ekonomi suatu negara tetapi juga ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian dan peranan sektor industri . Menurut Rostow pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain :

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi , politik , dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar.
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
3. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas , membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.
4. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi, merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu , penghargaan terhadap prestasi perorangan)

Proses pembangunan ekonomi menurut W.W Rostow bisa dibedakan dalam 5 tahap, yaitu :

- a) Masyarakat tradisional

Sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional adalah pertanian, dengan cara-cara bertani yang tradisional. Produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan oleh struktur hirarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah. Pada masyarakat tradisional ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai, karena masyarakat pada saat itu, masih mempercayai kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan diluar kekuasaan manusia atau hal gaib. manusia yang percaya akan hal demikian, tunduk kepada alam dan belum bias menguasai alam akibatnya produksi sangat terbatas masyarakat tradisioanal itu cenderung bersifat statis (kemajuan berjalan sangat lamban) produksi dipakai untuk konsumsi sendiri, tidak ada di investasi. Generasi ke generasi tidak ada perkembangan, dalam hal ini yaitu antara orangtua dan anaknya, memiliki pekerjaan yang sama dan keduduakn yang sederajat. Ciri-ciri tahap masyarakat tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Produksi terbatas, cara produksi masih primitif, dan tingkat produktifitas masyarakat rendah.
- b. Struktur sosial bersifat hierarkis, yaitu kedudukan masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyang mereka.
- c. Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah.

Orang Kanekes atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan "Baduy" merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden). Bahasa yang mereka gunakan adalah Bahasa Sunda dialek Sunda-Banten. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes 'dalam' tidak mengenal budaya tulis. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita) untuk menjaga harmoni dunia.

b) Pra-kondisi tinggal landas

Selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini, yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan. Sebuah prasyarat untuk pra-kondisi tinggal landas adalah revolusi industri yang berlangsung dalam satu abad terakhir.

Pembangunan ekonomi menurut Rostow adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan karekteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur social, system nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Jika perubahan seperti itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sudah terjadi. Suatu masyarakat yang sudah mencapai proses pertumbuhan

yang demikian sifatnya, dimana pertumbuhan ekonomi sudah sering terjadi, boleh dianggap sudah berada pada tahap prasyarat tinggal landas.

Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (self-sustainable growth). Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak. Pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh Negara Eropa, Asia, Timur tengah, dan Afrika, dimana tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Corak yang kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh Negara-negara Born free (menurut Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dimana Negara-negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat negara-negara tersebut terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifit-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk tahap prasyarat tinggal landas.

Seperti telah diungkapkan dimuka, Rostow sangat menekankan perlunya perubahan-perubahan yang multidimensional, karena ia tak yakin akan kebenaran pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan akan dapat dengan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditingkatkan. Menurut pendapat tersebut tingkat tabungan yang tinggi akan mengakibatkan tingkat investasi tinggi pula sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional. Namun menurut Rostow pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itulah yang akan memungkinkan terjadinya kenaikan tabungan dan penggunaan tabungan itu sebaik-baiknya.

Perubahan-perubahan yang dimaksud Rostow misalnya kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi. Disamping itu harus ada pula orang-orang yang menggunakan penemuan baru tersebut untuk memodernisir cara produksi dan harus didukung pula dengan adanya sekelompok masyarakat yang menciptakan tabungan dan meminjamkannya kepada wiraswasta, yang inovatif untuk meningkatkan produksi dan menaikkan produktivitas. Singkatnya, kenaikan investasi yang akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya bukan semata-mata tergantung pada kenaikan tingkat tabungan, tetapi juga kepada perubahan radikal dalam sikap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, perubahan teknik produksi, pengambilan resiko dan sebagainya.

Selain hal-hal diatas, Rostow menekankan pula kenaikan tingkat investasi hanya mungkin terjadi jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan disektor pertanian, pertambangan dan prasarana harus terjadi semata-mata dengan proses peningkatan investasi. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan.

Menurut Rostow, kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Peranan sektor pertanian tersebut antara lain, pertama, kemajuan pertanian menjamin penyediaan bahan makanan bagi penduduk di pedesaan maupun diperkotaan. Hal ini menjamin penduduk agar tidak

kelaparan dan menghemat devisa karena import bahan makanan dapat dihindari. Kedua, kenaikan produktivitas di sektor pertanian akan memperluas pasar dari berbagai kegiatan industri. Kenaikan pendapatan petani akan memperluas pasar industri barang-barang konsumsi, kenaikan produktivitas pertanian akan memperluas pasar industri-industri penghasil input pertanian modern seperti mesin-mesin pertanian dan pupuk kimia, kenaikan pendapatan di sektor pertanian akan menciptakan tabungan yang bias digunakan sektor lain (terutama industri) sehingga bias meningkatkan investasi di sektor-sektor lain tersebut.

Biasanya kondisi pada saat ini terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang lebih sudah maju. Masyarakat di dalamnya tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri, atau bukan karena factor internal dari masyarakat itu sendiri. Dikarenakan adanya goncangan campur tangan dari luar maka timbullah berkembang ide pembaharuan.

Tahap Tinggal Landas (Lepas Landas)

Tahapan ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Karakteristik utama dari pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan dari dalam yang berkelanjutan yang tidak membutuhkan dorongan dari luar. Seperti, industri tekstil di Inggris, beberapa industri dapat mendukung pembangunan. Secara umum “tinggal landas” terjadi dalam dua atau tiga dekade terakhir. Misalnya, di Inggris telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-17 atau di Jerman pada akhir abad ke-17.

Pada tahap ini telah tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan ekonomi, serta tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10 % dari pendapatan nasional atau lebih. Industri-industri pun mulai berkembang dengan sangat pesat keuntungannya sebagian besar ditanamkan ke industri yang baru. Dan sector modern dalam perekonomian pun berkembang.

Pada tahap tinggal landas, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan perkapita semakin besar.

Untuk mengetahui apakah sesuatu negara sudah mencapai tahap tinggal landas atau belum, Rostow mengemukakan tiga ciri dari masa tinggal landas yaitu:

1. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari Produk Nasional Netto atau NNP.
2. Berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi.
3. Adanya atau segera terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

c) Menuju Kedewasaan

Setelah lepas landas akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Pendapatan nasional selalu di investasikan kembali sebesar 10% sampai 20%, untuk mengatasi persoalan pertumbuhan penduduk.

Kedewasaan pembangunan ditandai oleh investasi yang terus-menerus antara 40 hingga 60 persen. Dalam tahap ini mulai bermunculan industri dengan teknologi baru, misalnya industri kimia atau industri listrik. Ini merupakan konsekuensi dari kemakmuran ekonomi dan sosial. Pada umumnya, tahapan ini dimulai sekitar 60 tahun setelah tinggal landas. Di Eropa, tahapan ini berlangsung sejak tahun 1900.

Kedewasaan dimulai ketika perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal.

d) Era konsumsi tinggi

Ini merupakan tahapan terakhir dari lima tahap model pembangunan Rostow. Pada tahap ini, sebagian besar masyarakat hidup makmur. Orang-orang yang hidup di masyarakat itu mendapat kemakmuran dan keberagaman sekaligus. Menurut Rostow, saat ini masyarakat yang sedang berada dalam tahapan ini adalah masyarakat Barat atau Utara.

Pada tahap ini perhatian masyarakat sudah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi.

Terdapat 3 macam tujuan masyarakat atau negara yaitu:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.
- b. Menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif
- c. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok yang meliputi pula barang yang tahan lama dan barang mewah.

Selain itu juga, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang utama. Pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang bias menopang kemajuan secara terus-menerus. Pada masa ini Rostow juga berbicara tentang keperluan akan adanya sekelompok wiraswastawan yakni orang-orang yang berani melakukan tindakan pembaharuan meskipun ada resiko. Terdapat dua kondisi sosial yang menyebabkan lahirnya para wiraswastawan ini, yaitu :

- a. Adanya masyarakat modern yang ingin mencapai kekuasaan melalui cara-cara konvensional. Tetapi masyarakat tradisional tidak memberikan hak kepada masyarakat modern karena masyarakat tradisional itu premitif.
- b. Masyarakat tradisional cukup fleksibel atau memberikan kebebasan kepada warganya untuk mencari kekayaan atau kekuasaan politik untuk menaikkan statusnya ditengah-tengah masyarakat. Kelompok inilah yang akan menjadi tenaga pendorong untuk melakukan pembaharuan, melupakan kelompok yang, memiliki semangat tinggi karena tatanan sosial politik tidak mengekang dirinya.

DOKTRIN MARITIM

Doktrin merupakan suatu pedoman tata laku yang bersifat mendasar dan umum yang diyakini kebenarannya untuk menghadapi sesuatu masalah yang merupakan penerapan atau sebagai sumber dari strategi, dalam aplikasinya tergantung dari situasi yang berlaku pada saat itu. Ketika kita melihat proses terjadinya, sebuah doktrin akan berkembang melalui proses penalaran dengan dipengaruhi oleh beberapa instrumennya.

Perumusan suatu doktrin maritim merupakan "Pemikiran atau cara terbaik, mengenai suatu masalah dan menyatakan serta membimbing para penganutnya dalam hal ini rakyatnya, untuk menghadapi masalah maritim dan instrumen maritim didalamnya; doktrin telah diyakini kebenarannya oleh para penganutnya, diajarkan serta disebar luaskan namun pelaksanaannya harus didasarkan pada penalaran yang memadai kondisi yang berlaku pada saat itu". Doktrin maritim berisikan prinsip prinsip dimana kekuatan kekuatan maritim mengarahkan tindakan tindakannya untuk mendukung cita cita nasional, doktrin maritim diambil dari pengalaman pengalaman keterlibatannya nasional maupun kancan internasional suatu negara.

Istilah maritim dapat berkaitan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Secara primer pengertiannya adalah sifat yang menggambarkan obyek atau aktivitas berkenaan dengan laut. Dalam konteks negara kepulauan negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut (UNCLOS Bab IV *archipelagic state*).

Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai corak ragam kondisi sosial budaya secara historis memiliki karakter bahari yang kuat. Saat ini telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan lingkungan strategis maritim, baik kawasan regional maupun internasional hal ini sangat mempengaruhi pola berpikir, cara bertindak dalam penentuan kebijakan politik suatu negara. Perubahan tersebut secara otomatis pula mempengaruhi penentuan strategi maritim masing-masing negara, yang merupakan aplikasi dari doktrin maritim yang dilaksanakan oleh setiap negara. Indonesia membutuhkan doktrin maritim sebagai pengoprasionalan pilihan strategi dan prioritas pembangunan ke depan. Dengan demikian negara maritim bisa dipahami sebagai negara yang dianggap peduli dan mampu dalam mengelola sumber daya kekayaan alam dari dasar hingga permukaan lautnya dan bahkan hingga lautan samudera.

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, hal ini didukung oleh 17.000 an pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan panjang pantai sekitar 95.181 km yang menempati urutan ke-4 di dunia setelah Kanada (265.523 km), Amerika Serikat (133.312 km) dan Rusia (110.310 km) (WRI, 2001). Oleh karenanya sangat wajar bila konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 25 Amandemen ke-2 UUD 1945 bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

Pencantuman "negara kepulauan yang berciri nusantara" tidak dapat dilepaskan dari konsepsi Wawasan Nusantara yang dikenal dengan "Deklarasi Djuanda" pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan salah satu tiang utama dalam sejarah kehidupan Bangsa Indonesia. Konsepsi Negara Kepulauan yang diperjuangkan selama 25 tahun sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 baru mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai rezim hukum baru setelah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 ditandatangani. Dengan demikian, bagi Indonesia, pengakuan internasional melalui UNCLOS 1982 itu hanyalah

bersifat pengukuhan saja dari yang telah dipraktikkan sejak diumumkannya Konsepsi Negara Kepulauan pada tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui UU No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Muhjidin, 1993). Berdasarkan landasan hukum kewilayahan tersebut maka 5,8 juta km² atau 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut dengan potensi ekonomi yang besar serta sejarah panjang kemampuan kerajaan di nusantara menguasai samudra sehingga sebenarnya laut merupakan jatidiri bangsa Indonesia

KEDAULATAN NEGARA

Berkaitan dengan kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu Negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara (Hadiwijoyo, 2009:24).

Karakteristik utama negara-bangsa adalah kedaulatan. Dalam literatur hubungan internasional kedaulatan negara diartikan sebagai otoritas atau kekuasaan negara tertinggi yang tunduk kepada batasan-batasan eksternal (Coulombis & Wolfe, 1990:77).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa : Kedaulatan negara merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, di mana tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian (Kusumaatmaja, 1982 : 15). Suatu negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain (Rudi, 2002). Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok yaitu :

1. Asli yang artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
2. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.
3. Tunggal (bulat) artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain.
4. Tidak terbatas (absolut) artinya kekuasaan ini tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap (Budiyanto, 2003:25).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kuat (Pasolong, 2012:175). Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode survei dengan teknik observasi, dokumentasi, kepustakaan dan angket yang disebarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBANGUNAN MARITIM

Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Pada tataran Kebijakan Nasional belum terlihat jabaran strategi pertahanan maritim Indonesia meskipun pada undang-undang dan kebijakan umum pertahanan negara telah dinyatakan bahwa upaya pertahanan harus memperhatikan kondisi geografis. Kita akan menghadapi legal constrain apabila menganalisis pendekatan top-down pada institusi institusi yang ada, seperti TNI AL, Polri, Bakorkamla yang sekarang telah menjadi Bakamla ataupun Coast Guard yang akan dibentuk, apabila dihadapkan pada tindak kriminal seperti transnational crime karena aturannya memang belum ada. Sesungguhnya sejak tahun 2005 TNI AL telah memformulasikan SPLN yang dilanjutkan dengan penyusunan SPMI. Namun konsep ini tidak didukung dengan komitmen pada tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan pertahanan negara maritim. Oleh karenanya kebijakan pertahanan nasional belum bisa dikatakan berpusat pada kerangka maritim. Secara konseptual dapat dinyatakan bahwa membangun strategi maritim dilakukan dengan memenuhi aspek political will sebagai modal dasar untuk mewujudkan pertahanan maritim yang tangguh (ends), Sea Power yang kuat (means), dan melaksanakan sea control dan power projection ashore (ways).

Dalam penyusunan suatu konsep strategi maritim negara manapun tidak ada yang sama, karena instrumen instrumen yang dimilikinya berbeda dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi geografik serta sistim politik negara bersangkutan. Demikian pula dengan Indonesia, yang memiliki kekhususan tersendiri ditinjau dari segi geografi, hal tersebut dikarenakan geography is the bone of strategy. Pada pola bottom-up sebenarnya peran universal TNI AL seharusnya sudah sangat relevan dengan strategi pertahanan maritim karena institusi ini sebagai unsur pertahanan yang menjadi ujung tombak sebagai negara maritim. Dalam hal ini TNI AL berjalan pada dua strategi dasar yaitu Pengendalian Maritim dan Proyeksi kekuatan, dan ini pula bisa dijadikan level minor pada pertahanan maritim. Kajian terhadap Doktrin Eka Sasana Jaya berkelanjutan sangat relevan karena aplikasi dari doktrin ini mampu untuk menemukan pola Pertahanan Maritim Indonesia.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan , Indonesia memiliki rancangan program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dengan sasaran “Terwujudnya Indonesia sebagai negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional”. Mulai tahun 2017 dana yang dianggarkan untuk infrastruktur lebih tinggi dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Tercatat APBN 2017 pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar 387,3 triliun rupiah, naik menjadi 123,4% per tahun 2017, hal ini mengindikasikan bahwasannya pemerintah mendukung penuh pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam hal ini , kaitannya dengan infrastruktur laut adalah adanya program pemerintah yang dinamakan tol laut.

Tol Laut adalah sebuah gagasan dengan memandang laut sebagai penghubung berbagai daerah yang ada di Indonesia. Program ini sudah berjalan sejak awal November 2015. Gambarannya akan ada kapal-kapal yang besar bolak-balik di laut Indonesia, sehingga biaya logistik menjadi murah. Salah satu faktor penunjangnya adalah kebutuhan akan pelabuhan laut dalam (deep sea port) untuk memberi jalan bagi

kapal -kapal besar yang melintas rute dari sabang sampai Merauke. Sebuah jalur yang membentang sejauh 5.000 kilometer atau seperdelapan keliling bumi.

PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam hal ini keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sector atau instansi pemerintah. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mesyarakatkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan bidang ilmu: ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan. Mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri dari tiga tahap utama: perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi maka keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Berbagai proyek, program dan kegiatan telah dilakukan. Namun hasil yang diperoleh dapat dikatakan belum memperoleh hasil yang maksimal. Pertumbuhan penduduk yang menempati kawasan pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya. Program-program pemerintah tersebut antara lain motorisasi armada nelayan skala kecil, penerapan sistem rantai dingin (*cold chain system*), pembangunan prasarana perikanan, dan sebagainya. Program lain yang berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup adalah pembuatan karang buatan, penanam kembali hutan bakau, konservasi kawasan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destruktif adalah program-program pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan.

Demikian juga pola usaha yang secara marak dikembangkan di hampir seluruh Indonesia adalah perikanan inti rakyat, suatu sistem usaha dimana nelayan sebagai plasma bermitra dengan perusahaan sebagai inti. Namun demikian bisa juga dikatakan bahwa upaya-upaya dari sisi kelembagaan ini belum juga memberikan hasil yang jelas menguntungkan nelayan. Meskipun banyak kelembagaan nelayan terbentuk, namun hanya sedikit bisa bertahan. Dengan bergantinya waktu, banyak juga lembaga-lembaga nelayan yang perlahan-lahan mati dan tidak berfungsi. Demikian juga banyak kemitraan nelayan dan perusahaan besar tidak berlanjut karena ketidakadilan dalam pembagian hasil, resiko dan biaya. Malahan sebaliknya, pola hubungan kemitraan antara nelayan dan swasta menjadi sesuatu yang dinilai negatif oleh nelayan dan konsep yang bagus ini ditolak oleh nelayan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Implementasi pembangunan maritim sangat berpengaruh terhadap kedaulatan NKRI. Hal ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan pemerintah untuk menciptakan

kestabilan politik di wilayah regional Asia Tenggara. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menguasai wilayahnya secara utuh tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Perjalanan pembangunan maritim Indonesia masih sangat jauh dan harus tetap ditingkatkan untuk menciptakan kedaulatan Negara.

SARAN

Untuk menciptakan kedaulatan negara secara utuh dilautan maka dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Doktrin bahwa Negara Indonesia adalah negara Maritim harus tetap didengungkan dan disebarluaskan.
2. Pembangunan perekonomian masyarakat pesisir harus ditingkatkan
3. Infrastruktur kelautan harus lebih nyata

DAFTAR PUSTAKA

Dadang Juliantara, *Maritim, Partnership, dan Pembaruan* (Jakarta : Pembaruan, 2004)

Surya, " Penerapan Aturan IMO : Indonesia Terlambat", 5 Juli 2004, hal 26.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah